

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, 2003
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradian Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Surakarta, FH Univ. Sebelas Maret, 2015.
- Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Media Group, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pres, 2011.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pres 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003.

Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

### **Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: 043/A/JA/11/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor KEP-049/A/J.A/03/2012, B/23/III/2012 dan SPJ-39/01/03/2012 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Bersama Ketua KPK dengan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor KEP-347/A/J.A/12/2005 tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Jurnal**

Fryner Really Maukar, *Kewenangan Jaksa Selaku Penuntut Umum Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Jurnal Lex Administratum, Vol. IV, No.4, April 2016.

Husin Husaini dan Muhammad Afdhal Askar, *Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Bertuah, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.

Ratna Sari Dewi Polontalo, *Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 7, No. 6, Agustus, 2018.

Retno Mawarini Sukmariningsih, *Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 2, Juni 2014

Roy Saphely, *Keberadaan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, 2017.

Titon Slamet Kurnia, *KPK Sebagai Tata Konstitusional Abnormal dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

### Media Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3810/ad-hoc/>, diakses tanggal 28 Februari 2021.

[https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/04-Modul-Kelembagaan-KPK-UMUM\\_OK.pdf](https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/04-Modul-Kelembagaan-KPK-UMUM_OK.pdf), diakses tanggal 28 Februari 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55f5d5f0eeb6e/kewenangan-kpk-dalam-mengeksekusi-putusan/>, diakses tanggal 1 Maret 2021.

<https://komisi-kejaksaan.go.id/satu-komando-penuntutan-untuk-sipil-dan-militer/>, diakses tanggal 15 April 2021

<http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/877>, diakses tanggal 3 Mei 2021.

<https://www.rmollampung.id/ruu-kejaksaan-optimalisasi-penuntutan>, diakses tanggal 13 Juni 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ca466cb7f8ed/keberadaan-kpk-dalam-upaya-pemberantasan-korupsi/>, diakses tanggal 13 Juli 2021.

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>, diakses tanggal 13 Juli 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/20/214049965/profil-singkat-5-pimpinan-baru-kpk-periode-2019-2023?page=all>, diakses tanggal 13 Juli 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a7f6af8d016/jampidsus-tegaskan-jaksa-adalah-satu/>, diakses tanggal 13 Juli 2021.